



Dampak Tsunami dan Gempa Bumi Pada 26 Desember 2004 terhadap Perusahaan-perusahaan Anggota APINDO di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ILO-APINDO Kajian Cepat
Banda Aceh - 23 Maret 2005

Prakata

Gempa bumi pada 26 Desember 2004 yang diikuti dengan tsunami telah menempatkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ke dalam krisis kemanusiaan. Kerusakan besar menimpa 14 kabupaten pantai Provinsi NAD, mengakibatkan 600.000 perempuan dan laki-laki kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan mereka, serta meluluhlantakkan sarana infrastruktur di sektor publik maupun swasta.

Salah satu kontribusi ILO dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi adalah membantu masyarakat untuk dapat kembali bekerja, memulihkan lapangan pekerjaan dan kegiatan mata pencaharian mereka.

Jelaslah bahwa membantu para pengusaha untuk memulai dan membangun kembali usaha mereka merupakan hal yang strategis dalam upaya pemulihan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

Melalui kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ILO melakukan penilaian mengenai dampak gempa bumi dan tsunami terhadap perusahaan-perusahaan anggota Apindo di 14 kabupaten yang paling terkena imbasnya di Aceh. Studi ini memaparkan kondisi masing-masing perusahaan sebelum dan sesudah bencana, terkait dengan sumber daya manusia, aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan data yang lebih gamblang mengenai tingkat kerusakan yang dirasakan perusahaan-perusahaan tersebut, serta mengembangkan strategi praktis guna mendukung upaya pemulihan bisnis mereka.

Kendati studi ini hanya memberikan perkiraan awal tentang kondisi perusahaan-perusahaan tersebut pada awal tahun ini, hasil studi ini tetap dapat memberikan indikasi umum mengenai dampak serius yang diderita akibat bencana tsunami.

Hasil studi memperkirakan kerusakan produktivitas akibat bencana tsunami dan gempa bumi ini mencapai 68%. Studi pun menyimpulkan bahwa tingkat kerusakan dan kesulitan yang dialami perusahaan, khususnya dalam memulai kembali kegiatan kerja, signifikan, di mana sekitar 40% staf dan 60% peralatan kantor ataupun pabrik hilang dan hancur.

Kami berharap, studi ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya-upaya untuk mengurangi dampak tsunami terhadap perusahaan di kabupaten-kabupaten yang terkena dampak tsunami, selain juga adapt membantu upaya pemulihan ekonomi dan rehabilitasi di Aceh.

Jakarta, Oktober 2005

Alan Boulton
Direktur ILO Jakarta

Kata Pengantar

Gempa bumi dengan skala 8,9 richter dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 telah memporak-porandakan sebagian besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Bencana alam terburuk dalam perjalanan sejarah Aceh ini telah menelan banyak korban harta dan jiwa manusia. Diperkirakan, sekitar 600.000 orang kehilangan jiwanya sementara triliunan rupiah harta benda tenggelam dalam musibah tersebut. Ketika itu, semua masyarakat Aceh larut dalam suasana duka dan kehilangan harapan.

Perasaan yang sama pun melanda anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di mana sebagian besar para anggotanya hilang dalam bencana alam tersebut, sedangkan mereka yang selamat tidak lagi memiliki apa-apa. Survei awal memperlihatkan bahwa Apindo mengalami kerugian cukup besar dan hanya sedikit sekali anggotanya yang selamat dari amukan gelombang tsunami tersebut. Kondisi itu semakin diperburuk dengan kurangnya perhatian dan bantuan baik dari pihak pemerintah maupun lembaga donor.

Saat Apindo berada dalam kondisi tak berdaya, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) menemui kami untuk menawarkan sejumlah bantuan, baik berupa bantuan teknis seperti kajian terhadap kondisi dan kerugian yang diderita Apindo maupun bantuan lainnya. Kami pun menyambut baik tawaran tersebut dengan perasaan bahagia karena telah membawa secercah harapan. Bantuan yang dicanangkan ILO itu kini berbuah nyata, berupa kajian terhadap para anggota Apindo di seluruh Provinsi NAD yang terkena imbas tsunami. Hasil kajian tersebut diterbitkan dalam bentuk laporan survei yang kini berada di tangan pembaca.

Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang signifikan tentang kondisi riil Apindo pasca tsunami melanda Provinsi NAD dan Nias. Laporan ini pun diharapkan dapat menjadi bahan acuan yang informatif dan valid bagi para pihak terkait. Bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang Apindo, laporan ini diharapkan dapat menjadi hipotesis awal bagi kajian-kajian berikutnya. Selain itu, Apindo pun membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat Aceh pada umumnya dan anggota Apindo khususnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi metodologi maupun substansi. Namun demikian, substansi yang terpapar di dalamnya dapat memberikan gambaran mengenai kondisi Apindo yang

sesungguhnya. Karenanya, pihak Apindo pun membuka pintu lebar-lebar kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan organisasi ini di masa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ILO yang mencurahkan segenap perhatian, waktu, tenaga dan bantuan, baik berupa bantuan materil maupun non-materil, demi terlaksananya penerbitan laporan ini.

Banda Aceh, Oktober 2005

H. M. Dahlan Sulaiman, S.E.

Ketua Apindo Provinsi NAD

Daftar Isi

Latar Belakang dan Justifikasi	5
Tujuan Dan Metodologi Penilaian	9
Gambaran Sekilas Apindo	13
Dampak Tsunami dan Gempa Bumi Terhadap Perusahaan-perusahaan Anggota Apindo di Provinsi Aceh	21
Pegawai	21
Kerusakan Fisik	23
Dampak terhadap aktifitas ekonomi	27
Kondisi Perusahaan Anggota Apindo per Kabupaten	30
Kesimpulan	41
Lampiran 1 Lembar Kuesioner	43

Latar Belakang dan Justifikasi

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menderita dampak yang sangat serius akibat gempa bumi dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004. Bencana tersebut menghancurkan bagian utara dan pantai barat Sumatera serta pulau-pulau terpencil di sekitarnya. Peristiwa itu menimbulkan banyak korban dan kerusakan di 14 kabupaten/kota di Aceh.

Peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh difokuskan pada pemulihan kehidupan di kawasan itu baik dilihat dari segi besaran, kualitas, maupun keberlanjutannya. ILO bermaksud memusatkan upaya ini dengan mendukung perusahaan-perusahaan yang ada dan meningkatkan partisipasi sosial baik dalam masalah perburuhan maupun pembangunan.

ILO memperkirakan ada sekitar 600 ribu lapangan pekerjaan yang hilang di Aceh. Kebanyakan pekerjaan-pekerjaan itu disediakan oleh perusahaan kecil. Sesungguhnya, dahsyatnya krisis di Aceh, dalam banyak kasus, tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menghitung dampaknya terhadap aktivitas ekonomi seperti yang semestinya. Dan tanpa penilaian yang cermat atas kondisi perusahaan-perusahaan itu, sulit bagi kita untuk memenuhi kebutuhan riil dan mendukung rehabilitasi perekonomian.

Dalam konteks inilah, ILO mendukung para konstituennya dalam mengatasi dampak krisis tersebut. Organisasi para pengusaha memainkan peran penting pada masa-masa setelah krisis dalam bentuk apapun karena mereka memiliki hubungan yang erat dengan para pengusaha. Terutama, dalam konteks Aceh, organisasi pengusaha seperti APINDO pasti dapat meningkatkan efektivitas upaya-upaya pemulihan kehidupan secara menyeluruh.

Survei ini, dengan segala keterbatasannya, merupakan penilaian pertama yang dilakukan atas perusahaan-perusahaan di Aceh, dan bahkan dengan sejumlah tingkat estimasi yang berbeda-beda, informasi yang dikumpulkan memberikan gambaran yang terang mengenai dampak krisis. Karena itu, baik ILO maupun APINDO dengan senang hati menyebarkan laporan ini kepada organisasi manapun yang tertarik pada aspek pemulihan ekonomi.

Tujuan dan Metodologi Penilaian

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan APINDO melakukan survei ini dengan menilai dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang lalu terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada APINDO di seluruh Provinsi NAD. Tujuan penilaian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan untuk menghitung kerusakan yang diderita perusahaan-perusahaan anggota.

Sampel yang digunakan dalam penilaian ini adalah 316 perusahaan yang telah terdaftar di APINDO. Seperangkat angket dikembangkan untuk menilai perusahaan berdasarkan basis individual (lembar kuesioner bisa dilihat pada lampiran 1). Demi untuk mengumpulkan data awal, maka angket itu disusun dalam bentuk sederhana dengan menggunakan pijakan awal “Panduan Pendataan Kebutuhan Secara Cepat” dan panduan pelaksanaan “Pembangunan Ekonomi Lokal dalam Menghadapi Krisis yang disusun oleh the IFP/CRISIS. Survei ini difokuskan pada identifikasi indikator-indikator kunci untuk menghitung dampak krisis terhadap perusahaan dengan membandingkan informasi yang ada sebelum dan sesudah gempa bumi dan tsunami.

Proses pengumpulan kuesioner dilakukan APINDO dengan menyebarkan delapan petugas ke semua wilayah Aceh selama dua minggu. Data yang telah diperoleh dimasukkan dalam database yang sudah disiapkan sebelumnya di Banda Aceh. Database ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi gambaran umum mengenai 316 anggota APINDO di Aceh, juga informasi mengenai kabupaten/kota yang disurvei. Ini dilakukan karena dampak krisis ini tidaklah sama dan laporan yang akan muncul nanti kurang akurat jika data yang diproses hanya melihat Aceh secara keseluruhan.

Pada kenyataannya, beberapa informasi yang diterima dan dikumpulkan tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Karena itu, beberapa informasi yang ada pada lembaran ini harus dipertimbangkan sebagai perkiraan awal sementara, namun hal ini tidaklah jauh menyimpang dari kenyataan. Ada ruang dan kesempatan yang terbuka untuk melakukan analisis yang lebih akurat.

Semua angket dan informasi database akan ditinggalkan di APINDO sebagai kontribusi untuk mengetahui lebih dalam mengenai anggota APINDO.

Gambaran Sekilas APINDO

APINDO adalah organisasi pengusaha di Indonesia yang demokratis, bebas, dan independen, dengan tujuan spesifik yang berkaitan dengan hubungan perburuhan atau hubungan industrial. Organisasi ini didirikan di Jakarta dengan menggunakan nama awal Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI) pada 31 Januari 1952.

Pada kongres pertama PUSPI di Surabaya pada tahun 1985, nama tersebut diubah menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

APINDO Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk pada tahun 1988 untuk merespon perkembangan teknologi yang cepat dan meluasnya perdagangan bebas yang menimbulkan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha. Di lain pihak, masalah-masalah ekonomi tidak dikelola secara efisien maupun efektif.

Krisis multidimensional telah memberikan pengaruh yang hebat kepada perekonomian nasional. Kombinasi antara tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di sisi birokrat pemerintahan yang tidak efisien, peraturan yang tidak konsisten, produktivitas yang rendah, dan meningkatnya permintaan para pekerja telah menghasilkan ekonomi biaya tinggi. Semua itu mendorong pelarian modal ke luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi itu menjadikan pengangguran dan kemiskinan makin buruk.

Dalam situasi seperti itu, terdapat berbagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap perekonomian nasional dengan menciptakan hubungan yang sehat, aman, dan harmonis antara pengusaha dengan pekerja. APINDO menyediakan saluran di dalam mana komunitas bisnis bisa mengembangkan hubungan industrial yang dinamis dan berkelanjutan.

Sebelum tsunami, pengurus daerah APINDO Aceh telah melaksanakan beberapa tugas:

A. Pertahanan

1. Membantu membentuk dan memperluas peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja

2. Membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial
3. Membantu bernegosiasi dengan serikat pekerja dan pemerintah.

B. Perlindungan

1. APINDO ikut serta dalam diskusi untuk memformulasikan peraturan kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. APINDO terlibat dalam diskusi mengenai upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di NAD.
3. Dalam menciptakan sistem peringatan dini di tingkat kabupaten/kota yang rentan terhadap persoalan pergolakan perburuhan, APINDO mendorong perkuatan kaum buruh melalui lembaga bipartit dan tripartit.

Gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 telah mengundang perasaan duka dan simpati tidak hanya di Aceh tapi juga di seluruh dunia. Dunia usaha di provinsi ini juga lumpuh.

Di tengah-tengah kekacauan ini, dengan dunia usaha yang mandeg, ILO membantu APINDO Aceh untuk mengumpulkan data anggota-anggotanya setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami, serta membantu melakukan survei mengenai dampak bencana alam tersebut terhadap perusahaan. Data-data ini, yang berasal dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipaparkan dalam laporan ini.

Untuk memberdayakan kembali komunitas bisnis, kami mengusulkan sejumlah aksi:

1. ILO dan APINDO harus menindaklanjuti temuan dalam survei ini dengan menyediakan dana bagi para pengusaha sesegera mungkin.
2. Di samping memberikan bantuan dana kepada pengusaha, ILO dan APINDO juga harus menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pekerja.
3. Data mengenai anak-anak putus sekolah dan kaum muda yang memasuki dunia kerja juga harus dikumpulkan, sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.
4. ILO dan APINDO juga harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada usaha kerajinan tangan.
5. Setelah 5 sampai 10 tahun, ILO dan APINDO harus membuka kantor bersama di Banda Aceh untuk memonitor dan memberdayakan anggota masyarakat yang sudah mendapatkan berbagai fasilitas tadi.

Pengurus APINDO Nanggroe Aceh Darussalam

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : H.M. Dahlan Sulaiman SE |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. Fahrul Razi Z MBA |
| 3. Wakil Ketua | : Murni Muhammad SE |
| 4. Sekretaris | : Drs. H. M. Sufi Sulaiman |
| 5. Wakil Sekretaris | : Marzuki Sulaiman SH |
| 6. Bendahara | : Drs. Hj. Zahriani A. Balwy |
| 7. Wakil bendahara | : Drs. Saifullah M. Zen |

APINDO mempunyai 320 perusahaan yang menjadi anggota di NAD. Sebagian besar perusahaan itu hanya menjangkau pasar di tingkat lokal (kabupaten/kota). Beberapa yang lain memiliki jangkauan yang lebih luas sampai kabupaten/kota yang berdekatan, dan sedikit sekali dari mereka yang menjual produk dan jasa sampai keluar Provinsi NAD. Perlu juga dipertimbangkan, khususnya di daerah-daerah terpencil di mana daya beli turun secara signifikan, upaya pemulihan kapasitas perusahaan sampai mencapai level sebelum krisis tidak cukup menjamin ketersediaan pasar. Juga tidak ada jaminan bahwa rehabilitasi perusahaan-perusahaan itu akan mampu menghidupkan kembali perekonomian lokal. Perusahaan-perusahaan itu juga tidak akan mendapatkan pembeli, kecuali kalau penduduk yang mencari nafkah dari pertanian dan perikanan memiliki kesempatan untuk memperoleh kembali sumber-sumber pendapatannya.

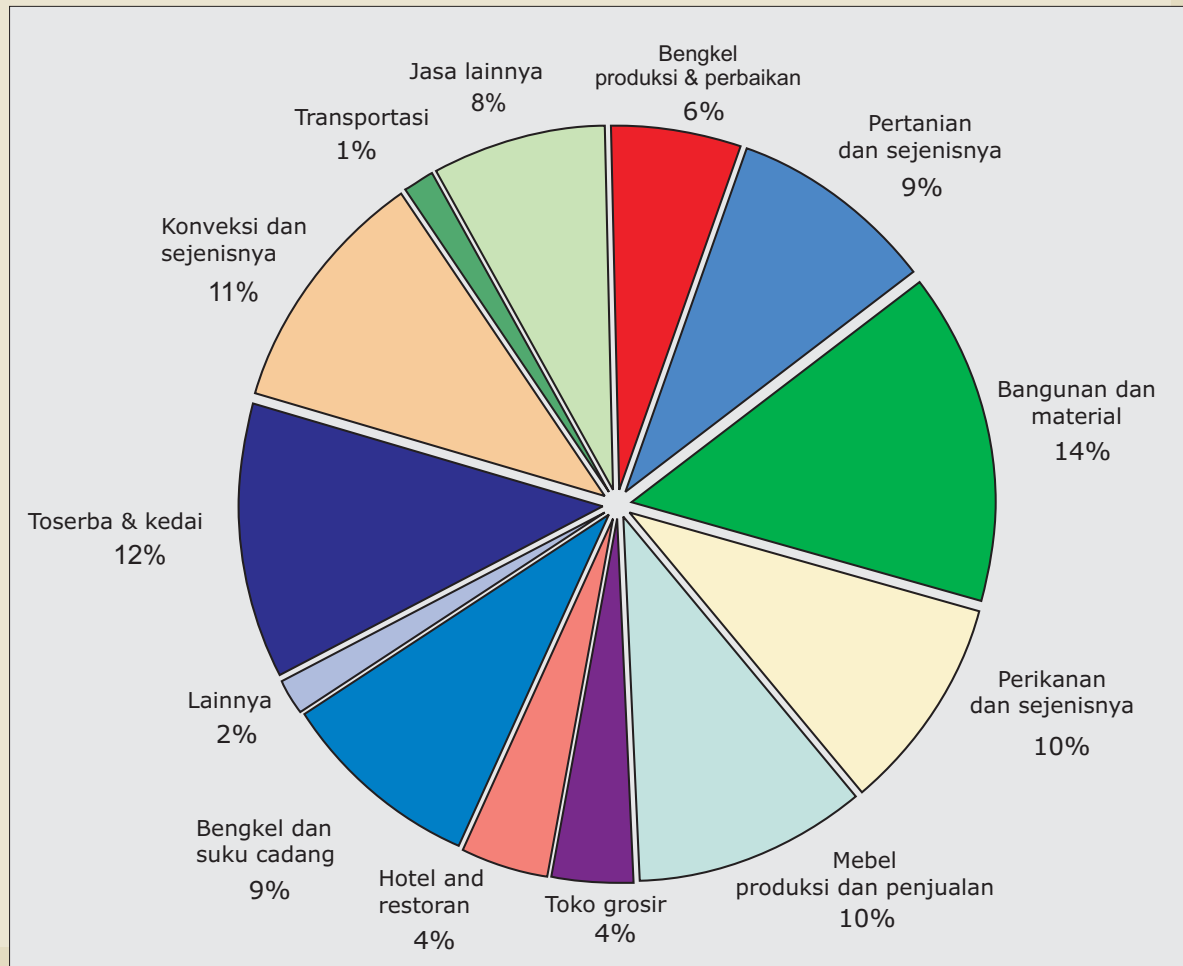
Lokasi PASAR Para Pengusaha Anggota APINDO

Lokal (daerah tingkat dua)	78,8 %
Kabupaten atau Kota tetangga	15,5 %
Di luar Aceh	4,0 %
Di luar Aceh dan mancanegara	0,7 %
NAD	1,1 %
	100.0 %

Perusahaan-perusahaan anggota APINDO terdiri dari usaha mikro hingga usaha kecil. Rata-rata perusahaan memiliki 11 pekerja yang terdiri dari tujuh pegawai tetap dan empat pekerja paruh waktu.

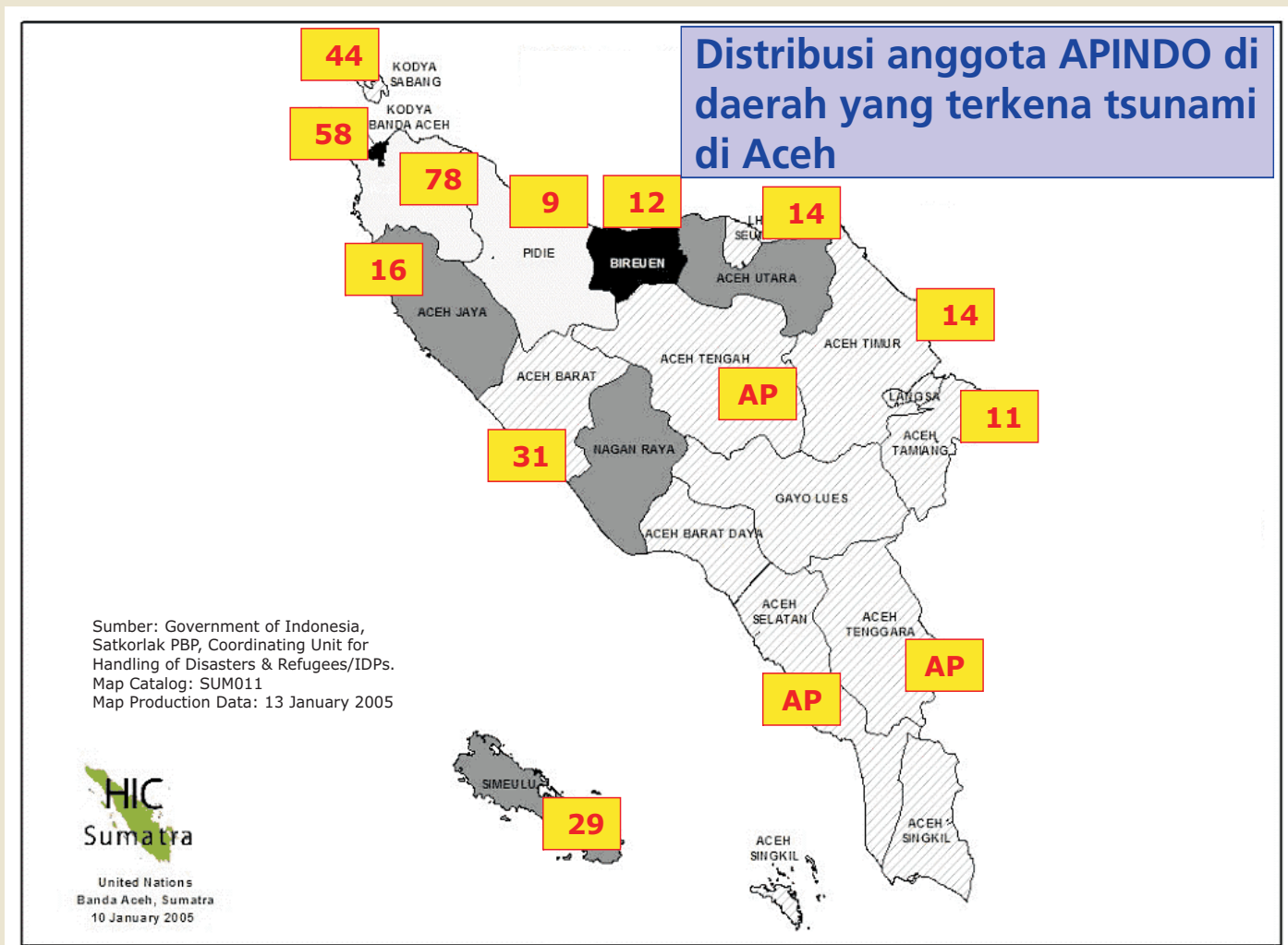
Anggota APINDO berkecimpung dalam aktifitas ekonomi yang beragam dalam mata rantai suplai untuk produk dan jasa yang berbeda-beda.

Diagram lingkaran berikut ini menunjukkan sektor bisnis yang digeluti anggota APINDO.



Survei yang dilakukan menjangkau 316 anggota APINDO yang telah terdaftar di seluruh wilayah Aceh, di mana sebagian besar dari mereka terkena dampak tsunami dan gempa bumi.

Peta berikut ini menunjukkan distribusi anggota APINDO di daerah-daerah yang terkena tsunami. Para usahawan itu telah diwawancarai secara langsung, tapi dalam beberapa kasus, wawancara dilakukan dengan teman atau mitra bisnis karena para pengelola perusahaan itu hilang atau meninggal.



Dampak Tsunami dan Gempa Bumi terhadap Perusahaan-perusahaan Anggota Apindo di Provinsi Aceh

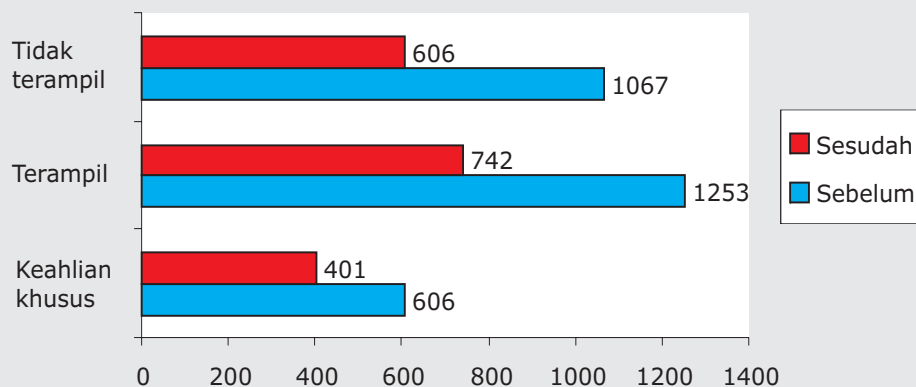
Pegawai

Jumlah pegawai yang bekerja di perusahaan-perusahaan anggota APINDO (pekerja tetap dan paruh waktu) sebelum bencana mencapai 3.382 orang. Jumlah ini termasuk pemilik usaha itu sendiri. Setelah bencana, jumlah pegawai berkurang secara drastis hingga tinggal 1.935 orang. Dengan demikian, 43 persen pekerja hilang hingga kini dan rata-rata besaran perusahaan berkurang dari 11 pegawai per perusahaan menjadi hanya 6 pegawai.

Sebaran tersebut diperkuat oleh data-data mengenai kondisi pekerja berdasarkan keahlian yang dibagi menjadi tiga kelompok, yakni pekerja dengan keahlian khusus, pekerja terampil, dan pekerja tidak terampil. Dalam tiga kategori itu, pekerja yang hilang berturut-turut mencapai 33 persen, 40 persen, dan 43 persen.

Namun, jika diperbandingkan, memang ada sedikit perbedaan. Jumlah pekerja dan pegawai yang tersisa yang disebut pada temuan pertama (1.935) sedikit lebih besar dari

Pegawai APINDO “berdasarkan keahlian” sebelum dan sesudah tsunami



total pekerja yang dibagi berdasarkan keterampilan mereka (1.749); hal ini mungkin saja karena kategori pekerja paruh waktu tidak selalu dimunculkan dalam penghitungan jumlah pekerja berdasarkan keahlian sebagaimana yang tertera pada diagram batang berikut ini.

Karena tingginya tingkat pengangguran di Aceh saat ini, perekrutan tenaga kerja baru atau pekerja yang tidak terampil bukanlah menjadi suatu masalah. Khususnya di daerah terpencil, para pengusaha memang dihadapkan pada masalah serius mengenai terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil atau yang memiliki keahlian khusus. Yang cukup mengejutkan, sangat sedikit pengusaha yang menganggap pelatihan sebagai kebutuhan pokok untuk memulai usahanya kembali (lihat juga tabel di halaman 12). Hal ini sangat kontras dengan pernyataan para pengusaha bahwa satu dari tiga pengusaha mengadakan pelatihan bagi staf mereka secara reguler. Dalam beberapa kasus, prioritas akan diberikan dalam bentuk penyediaan pelatihan keterampilan kejuruan dan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawannya yang akan menempatkan perusahaan-perusahaan itu ke dalam posisi terbaik untuk memulai kembali usaha mereka. Rata-rata usia pekerja perusahaan yang menjadi anggota Apindo di Aceh adalah 31 tahun. Karena itu, masih banyak peluang untuk memperoleh hasil pelatihan yang memuaskan.

Akibat dampak krisis yang begitu parah ini, proses pemulihan kembali kesempatan kerja akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pemulihan kehidupan penduduk lokal harus diutamakan melalui upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi. Perusahaan, jika didukung dengan dengan cara yang tepat, akan bisa memainkan peranan yang besar dalam penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat: perusahaan-perusahaan sektor konstruksi kini memiliki peluang untuk berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Akan tetapi, untuk melakukan semua itu, mereka membutuhkan tenaga kerja terampil. Karena itu, jika tenaga kerja terampil tidak tersedia dalam jumlah memadai, pelatihan yang dilaksanakan secara segera harus mendapatkan prioritas.

Kerusakan Fisik

Sampai saat ini, masih sangat sulit menghitung dengan tepat tingkat kerusakan, baik gedung maupun peralatan di perusahaan-perusahaan anggota APINDO akibat bencana tersebut. Beberapa desa tersapu habis oleh tsunami dan begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu. Tak dapat disangkal, sangat penting membuat perbedaan dampak krisis secara geografis. Sebagian besar pantai barat seperti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar terkena dampak yang sangat serius, sedangkan dampak bencana terhadap kawasan pantai timur laut tidaklah begitu besar. Bab ini akan menyediakan gambaran umum tentang perusahaan-perusahaan anggota APINDO di Provinsi NAD.

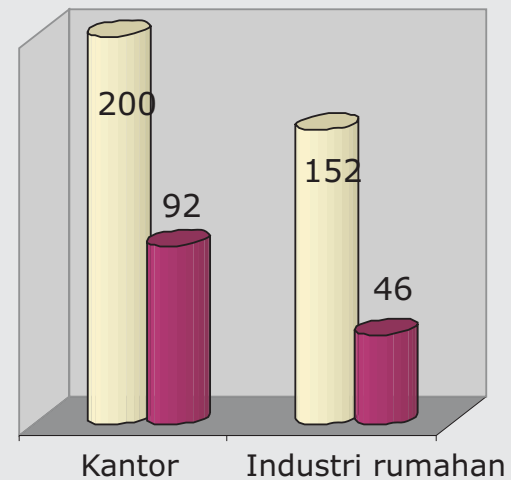
Pertama-tama, kami akan memaparkan tingkat kerusakan infrastruktur perusahaan. Tidak semua perusahaan yang ada mempunyai kantor atau bengkel karena

sebagian mereka juga menjalankan usahanya di sektor informal. Namun, dari data yang ada menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah kantor dan bengkel yang serius. Sekarang ini, 54 persen kantor dan 69 persen bengkel tidak berfungsi karena hilang ataupun rusak berat. (lihat tabel di samping ini).

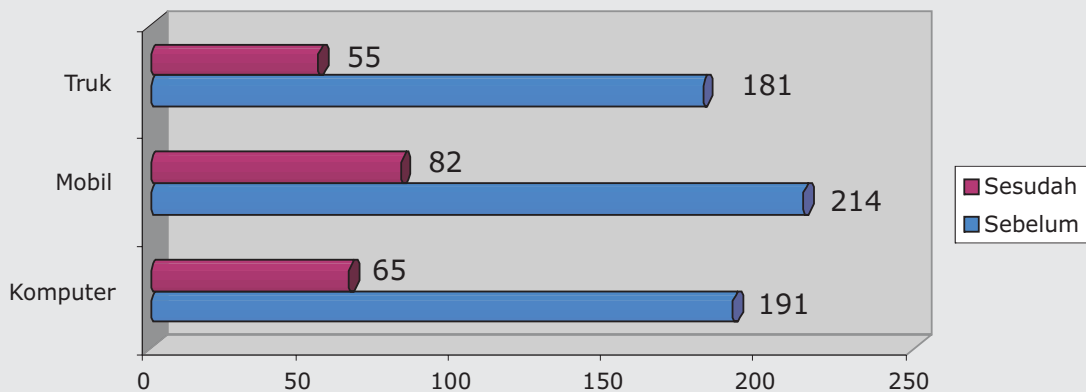
Kondisi tersebut jelas menjadi hambatan yang sangat berat untuk memulai kembali aktivitas ekonomi (memulai kembali memberikan implikasi sekurang-kurangnya ada sedikit aktivitas ekonomi yang akan dijalankan).

Usaha rekonstruksi harus memberikan perhatian khusus pada rehabilitasi tempat-tempat usaha di mana aktivitas ekonomi dapat dijalankan, karena pengusaha bisa memberikan kontribusi sangat berarti dalam memulihkan kehidupan masyarakat dengan menyediakan kesempatan kerja.

Data yang dikumpulkan menunjukkan beragamnya jumlah dan peralatan yang hilang termasuk perabotan, bahan baku, dan peralatan lainnya. Namun demikian, data yang bisa dikumpulkan hingga saat ini masih belum cukup akurat untuk dicantumkan dalam laporan ini. Kendati demikian, ada tiga jenis peralatan yang mudah dihitung yang bisa dijadikan indikator hilangnya fasilitas tersebut. Grafik batang berikut ini menunjukkan kehilangan peralatan yang sangat penting yang begitu dramatis.



Peralatan sebelum dan sesudah tsunami



Derajat kehilangan yang sama dapat diperkirakan untuk peralatan lain seperti mesin, sarana dan prasarana, perabotan, buku catatan, dan lain sebagainya.

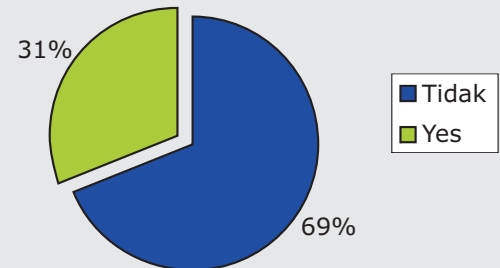
Laporan ini bermaksud

menyediakan data dan indikator; sehingga kita dapat memastikan bahwa secara rata-rata sekurang-kurangnya 60 persen peralatan milik perusahaan-perusahaan di Aceh telah hilang dan rusak. Gambaran ini memang diperoleh dengan tingkat estimasi yang berbeda-beda, tapi diharapkan tidak terlalu jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Lebih jauh, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di beberapa daerah persentase kerusakan atau hilang ini sangat rendah, tapi di tempat yang lain sangat tinggi.

Masyarakat Aceh mulai bergerak aktif dan cepat untuk merespon bencana yang maha dahsyat ini dan begitu juga yang dilakukan oleh sebagian perusahaan anggota APINDO. Diagram lingkaran di sebelah kiri menunjukkan bahwa hampir sepertiga pengusaha sudah mulai melakukan sebagian kegiatan rehabilitasi dalam upayanya memulai kembali aktifitas usaha mereka.

Pada kenyataannya, sebagian besar usahawan yang telah memberikan respon positif atas kuesioner ini tinggal di wilayah-wilayah yang kurang menderita dampak bencana. Karena itulah, penghitungan besaran rehabilitasi juga belum bisa dilakukan. Namun demikian, adalah masuk akal jika kita mengharapkan mereka yang kerusakan sarana dan parasarananya hanya sedikit sudah siap melakukan rehabilitasi sendiri.

Apakah proses rehabilitasi sudah dimulai?



Dampak terhadap aktifitas ekonomi

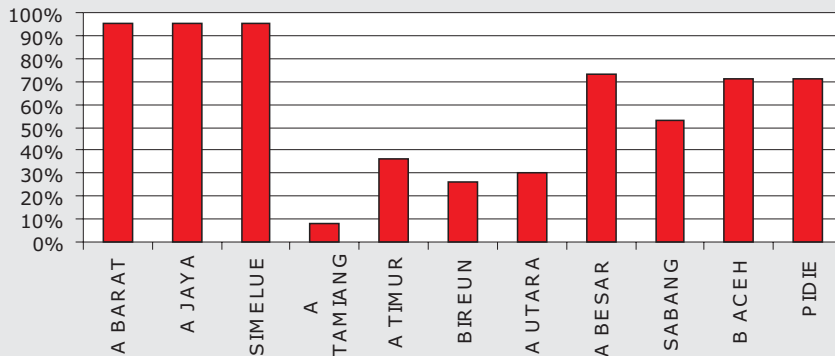
Secara umum, krisis ini mengurangi aktifitas perekonomian sampai 68 persen. Ini menggambarkan suatu dampak yang sangat besar dan hal ini dapat mematikan perusahaan-perusahaan yang ada apabila mereka tidak dilibatkan dengan cepat pada tahap pemulihan ini.

Sebagai catatan, tidak ada satu perusahaanpun yang berada di kawasan pantai barat yang mengaku produksinya tidak terkena pengaruh bencana sama sekali. Sementara itu, kabupaten yang tidak terlalu terkena dampak bencana seperti Aceh Timur dan Aceh Tamiang, terungkap dari jawaban yang mereka berikan, krisis ini tidak memberikan dampak apapun terhadap usaha mereka, Sebaliknya, dampak terhadap

1 Sangat mungkin sejumlah pengusahan mengklaim dampak yang lebih besar dengan harapan untuk menerima bantuan dalam bentuk dukungan keuangan segera.

usaha di pantai barat dan Pulau Semelue hampir mencapai 100 persen. Diagram batang di bawah ini menunjukkan dampak rata-rata terhadap produksi perusahaan-perusahaan anggota APINDO per kabupaten/kota seperti yang dilaporkan para pengusaha¹.

Perkiraan Pengusaha tentang dampak krisis terhadap produksi (rata-rata)



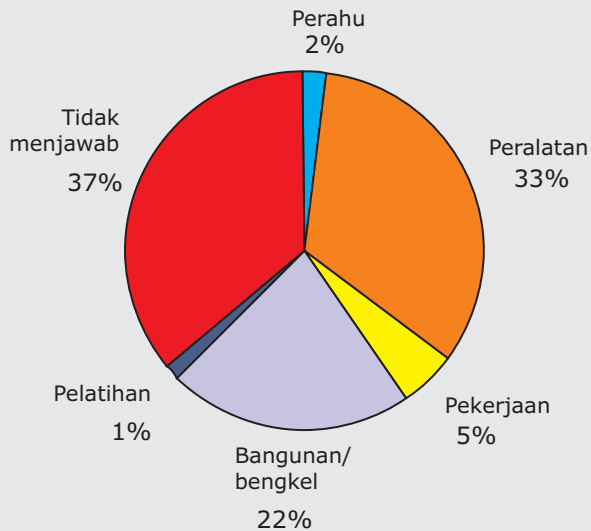
Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data awal yang berhubungan dengan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas kembali seperti pada tahap prakrisis. Kebutuhan finansial untuk memulihkan aktivitas ekonomi ini kemudian dianalisis kasus per kasus, dimulai dari anggaran tahunan masing-masing perusahaan pada masa sebelum krisis. Data berikut ini menampilkan tingkat estimasi yang berbeda-beda, tetapi sangatlah perlu untuk dicatat bahwa setiap perusahaan

rata-rata akan membutuhkan Rp 240 juta untuk membangun kembali usahanya sampai pulih 100 persen seperti sebelum bencana tsunami (lihat grafik di halaman 18). Perusahaan-perusahaan anggota APINDO di seluruh Aceh membutuhkan paling kurang Rp 75 miliar untuk memulihkan kembalinya usahanya 100 persen seperti pada masa sebelum krisis (juga lihat grafik di halaman 19).

Ketika para pengusaha ditanya tentang apa yang paling mereka perlukan untuk memulihkan/ merehabilitasi usahanya, mereka memberikan jawaban yang sama: bantuan dana (ini mencerminkan baik adanya kesamaan pandangan di antara mereka maupun adanya harapan untuk mendapatkan bantuan dari luar). Lebih dari itu, para pengusaha juga memberikan prioritas pada rehabilitasi infrastruktur dan pengadaan kembali peralatan usaha. Sejumlah responden dalam persentase yang signifikan tidak memberikan jawaban dan ini bisa dijelaskan melalui dua hal: 1) pewawancara tidak mengisi daftar kuesioner dengan akurat; 2) para pengusaha secara sederhana hanya memberikan indikasi bahwa secara umum mereka lebih membutuhkan modal sebagai kebutuhan utama. Diagram lingkaran di sebelah kiri menunjukkan sebaran kebutuhan yang penting yang diajukan para pengusaha.

Perbandingan data mengenai anggaran tahunan sebelum dan sesudah krisis tidak dapat diperoleh karena sebagian besar informasi setelah krisis hilang. Hal yang sama

Apa yang diperlukan untuk memulai kembali kegiatan?



berlaku juga dalam soal rencana ekspansi usaha, rasio produktifitas, dan kapasitas produksi sebelum dan sesudah krisis. Kurang akuratnya informasi ini disebabkan oleh sulitnya kondisi yang dihadapi pewawancara selama masa pengumpulan kuesioner. Lebih dari itu, banyak pengusaha yang tidak bisa menyiapkan rencana keuangan pada tahun 2005 dan beberapa tahun ke depan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan mereka.

Kekurangakuratan data ini juga bisa dilihat sebagai indikator betapa semrawutnya perusahaan-perusahaan anggota APINDO: sebagian besar dari mereka tidak mampu menghadapi dampak krisis terhadap aktivitas perekonomian mereka. Karena itu,

dukungan yang bersifat segera untuk membantu memperkuat kapasitas mereka baik dalam menghadapi krisis maupun membangun kembali usaha mereka, sesungguhnya merupakan persoalan yang harus segera diatasi.

Kondisi Perusahaan Anggota APINDO Per Kabupaten

Bagian ini mencurahkan perhatian pada pengamatan cepat atas dampak krisis di tingkat kabupaten/kota. Hal ini sangat penting untuk mengaitkannya baik dengan penilaian maupun dengan rencana rehabilitasi, dan perlu diingat bahwa dampak krisis berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Sebagaimana telah banyak didokumentasikan, daerah pantai barat sangat menderita dampak bencana ini, termasuk kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dan data-data yang dipaparkan pada bagian ini sangat memperkuat hal itu.

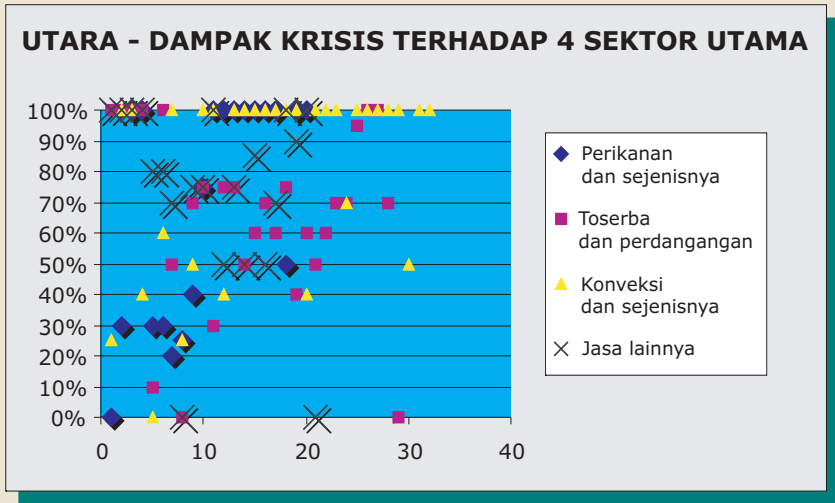
Untuk memudahkan pembedaan dampak krisis secara geografis, kami membagi 11 kabupaten/kota di Aceh ke dalam tiga zona, yakni UTARA yang terdiri dari Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang; BARAT: Simulue, Aceh Barat, Aceh Jaya; TIMUR: Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Tabel berikut ini menunjukkan sektor-sektor usaha yang digeluti anggota APINDO di tiga zona di Aceh.

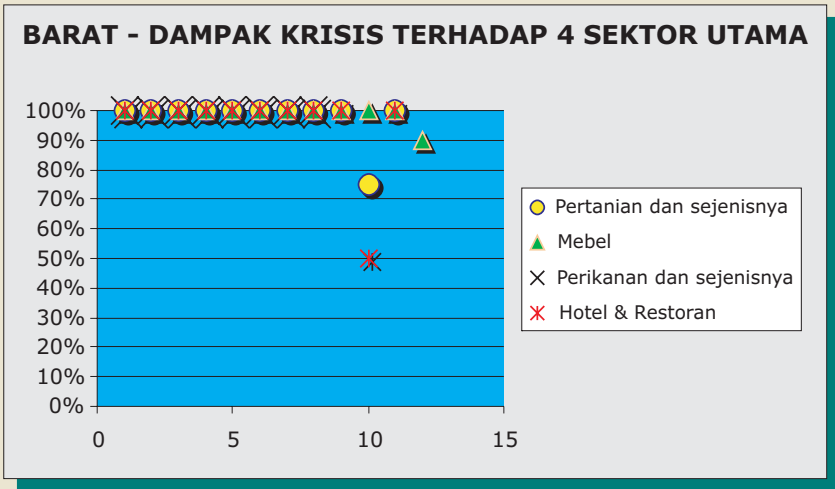
	Pertanian	Bangunan	Perikanan	Mebel	Grosir	Hotel	Mekanikal	Lainnya	Industri Rumahan	Pertanian	Perdagangan	Macam - macam	Bengkel	Total
Utara	8	19	20	12	9	1	11	5	29	31	2	21	11	179
Barat	11	8	8	12	3	11	4	0	7	3	1	3	5	76
Timur	10	19	2	8	13	3	1	0	1	1	0	1	2	61
	29	46	30	32	25	15	16	5	37	35	3	25	18	316

Gambaran visual mengenai kondisi tiga zona yang dikombinasikan dengan empat sektor utama ekonomi ditampilkan di bawah ini.

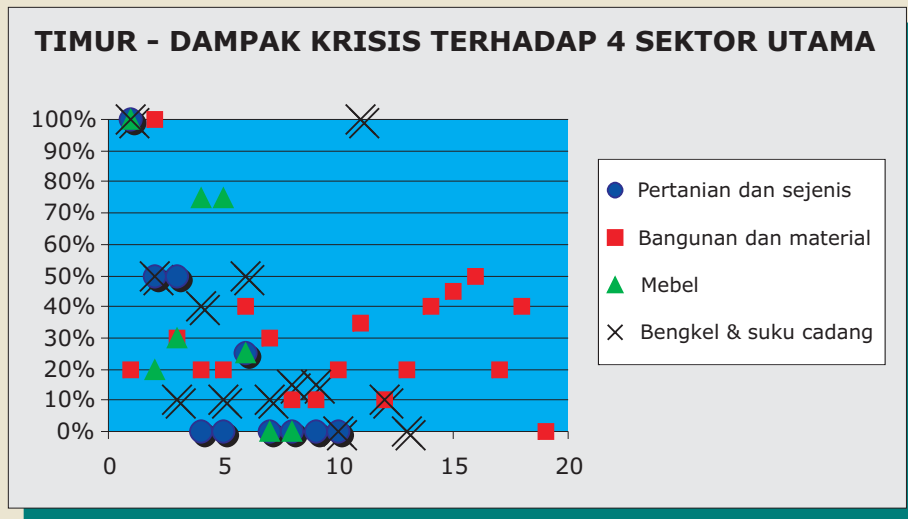
Di UTARA, dampak krisis menyebar tanpa ada kejadian yang istimewa di masing-masing empat sektor tersebut. Rata-rata dampak krisis atas dunia usaha di sana mencapai lebih dari 50 persen.



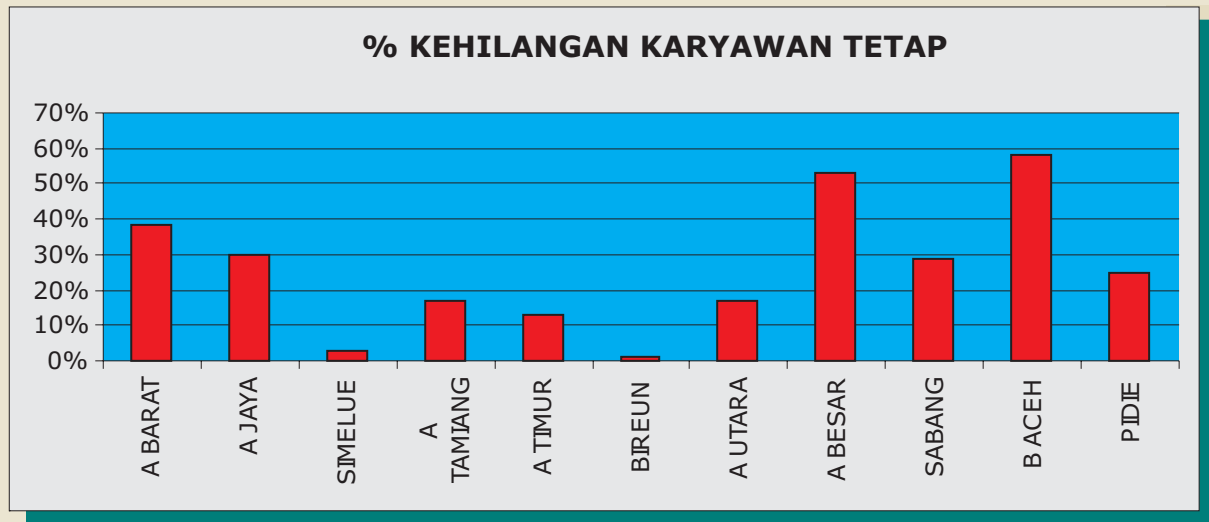
Di zona BARAT, grafik yang ada praktis tidak bisa dibaca, tapi itu merefleksikan betapa kacaunya situasi yang ada di kawasan itu, di mana hampir semua sektor usaha dihancurkan oleh krisis.



Akhirnya, di zona TIMUR, situasinya sangat berbeda secara radikal: hampir semua pengusaha di wilayah tersebut mengaku bahwa dampak krisis hanya berkisar 0-40 persen. Karena kondisinya paling bagus, hampir semua pengusaha bisa memulai kembali membangun usahanya dengan sedikit hambatan.



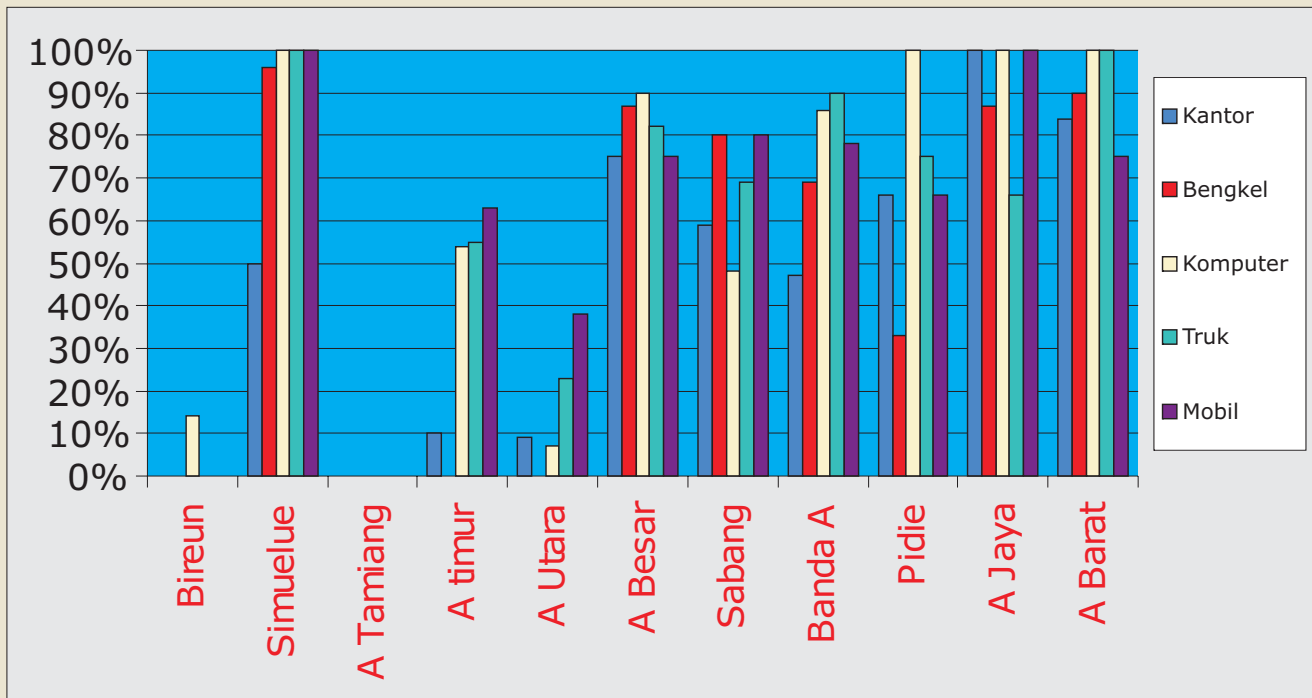
Grafik berikut ini menunjukkan persentase kehilangan karyawan di 11 kabupaten/ kota. Daerah yang sangat dipengaruhi bencana alam ini tergolong wilayah yang padat penduduk. Gambaran yang diberikan kepada kami mengkonfirmasi informasi mengenai Pulau Simelue di mana korban meninggal sangat sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kawasan pantai barat, padahal gelombang tsunami yang melanda kedua kawasan ini sama kuatnya. Hal ini menunjukkan adanya kearifan dan pengetahuan informal, historis, dan tradisional tentang bagaimana mencegah efek merusak dari gelombang tsunami.



Rata-rata besaran usaha perusahaan juga mengecil tapi dengan perbedaan yang besar di antara tiga zona (lihat tabel di bawah ini).

	Jumlah rata-rata Perusahaan		
	Sebelum	Sesudah	% Pengurangan Besaran
Utara	11.45	5.04	55.98%
Timur	10.57	9.15	13.43%
Barat	9.04	6.29	30.42%

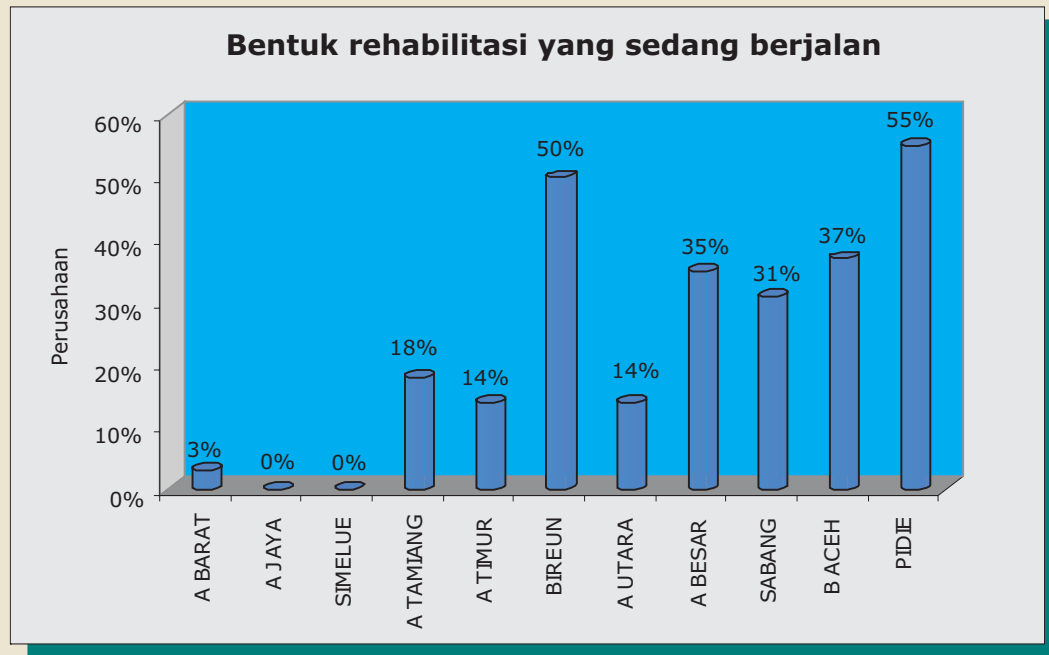
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang hilangnya banyak pegawai dan sarana produksi. Suatu analisis tentang fasilitas dan sarana yang rusak (dengan menggunakan lima indikator yang sama) membuktikan adanya perbedaan dampak yang substansial di antara berbagai wilayah tersebut. Untuk beberapa indikator, hasil dalam bentuk persentase mungkin sangat tinggi, tapi dalam kenyataannya hanya sedikit unit yang hilang. Contohnya, indikator “kehilangan alat angkut”. Di Kabupaten Aceh Besar, perusahaan-perusahaan anggota APINDO rata-rata memiliki 51 alat angkut dan sekarang mereka hanya mempunyai sembilan unit saja. Meskipun jika ditinjau secara umum hal ini bukan merupakan kehilangan yang besar, secara relatif hal itu tetap merupakan dampak yang sangat besar.



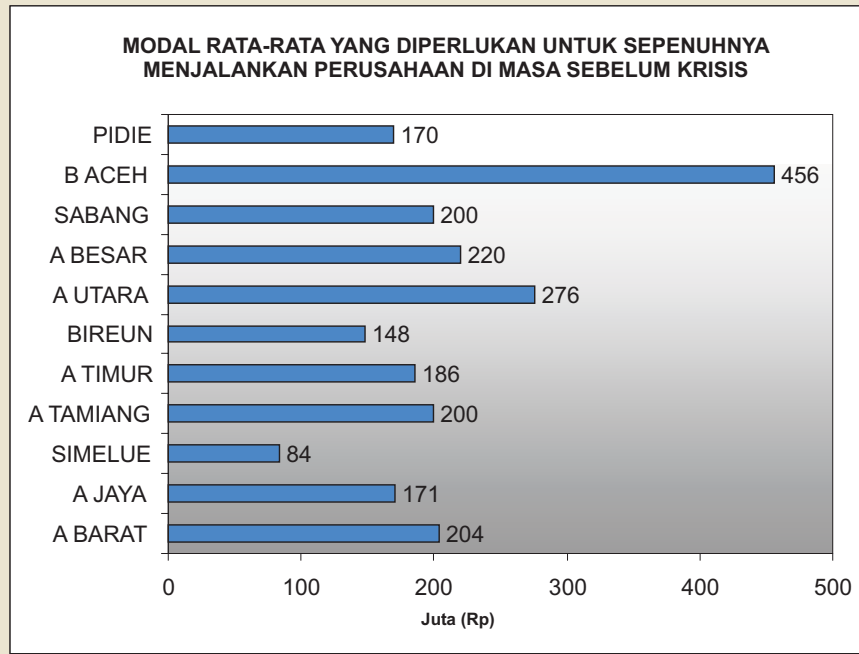
Juga menarik untuk membandingkan kondisi kerusakan dengan masa-masa awal pelaksanaan rehabilitasi seperti ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Beberapa wilayah mengalami sedikit kerusakan ketika mereka memulai program rehabilitasi. Hal ini bisa dijelaskan dengan melihat fakta bahwa di kebanyakan wilayah yang sangat menderita (seperti Pantai Barat atau Simelue), kerusakan sangat besar dan meluas hingga ke seluruh anggota komunitas, sehingga hampir mustahil memulai sesuatu pada saat ini. Perlu juga dijelaskan bahwa pada masa-masa awal rehabilitasi, di banyak wilayah, peralatan banyak digunakan untuk menyingkirkan puing dan membersihkan daerah-daerah yang dilanda bencana (khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar); sebaliknya, di lokasi-lokasi yang kurang terkena dampak krisis, berbagai bentuk rehabilitasi infrastruktur sudah mulai dijalankan. Rehabilitasi yang relatif berat di Banda Aceh dan Aceh Besar juga memperlihatkan fakta bahwa di daerah-daerah ini terdapat kombinasi dari perusahaan-perusahaan yang rusak berat dan yang hanya mengalami sedikit kerusakan.

Berdasarkan penilaian kerusakan yang ada, sangat menarik memperkirakan modal yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan itu untuk mencapai kembali produktivitas seperti sebelum krisis. Grafik berikut ini menunjukkan rata-rata biaya yang diperlukan untuk masing-masing kabupaten/kota. Data-data yang ada memperlihatkan besaran

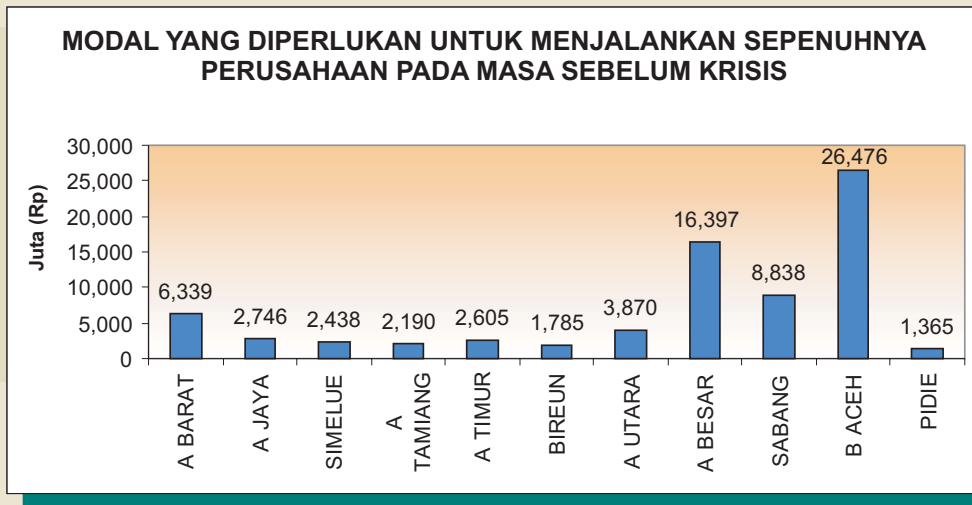
yang hampir sama. Karena itu, mereka tidak bisa membuat pertimbangan sederhana hanya dengan menghitung biaya rata-rata untuk masing-masing perusahaan. Untuk mendapatkan perkiraan yang tepat dibutuhkan pemilahan data, paling tidak atas dasar besaran perusahaan, baik berdasarkan jumlah pekerja, anggaran tahunan, dan tingkat kerusakan sarana dan peralatan.



Sesungguhnya, kita tidak memiliki data yang akurat mengenai berbagai indikator tersebut. Meskipun demikian, perkiraan kebutuhan modal rata-rata untuk masing-masing kabupaten/kota tetap merupakan persoalan yang relevan. Perkiraan kebutuhan modal untuk Banda Aceh jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan anggota APINDO lain yang berada di luar Banda Aceh. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan lokal di Banda Aceh memiliki skala usaha yang jauh lebih besar dan mempunyai jaringan pemasaran yang jangkauannya luas. (sehingga mereka memerlukan peralatan lebih banyak) dibandingkan perusahaan di kabupaten lain (beberapa temuan kualitatif mendukung pendapat ini). Penjelasan lain untuk menerangkan sangat rendahnya kebutuhan modal untuk memulihkan perusahaan-perusahaan di Simelue adalah dengan melihat perusahaan mikro lokal yang berukuran sedang. Grafik berikut ini menunjukkan detail perkiraan rata-rata jumlah modal yang diperlukan untuk memulihkan perusahaan-perusahaan di kabupaten/kota yang berbeda.



Informasi lain yang mungkin sangat berguna yang berasal dari perspektif APINDO adalah modal yang dibutuhkan untuk memulihkan masing-masing anggota APINDO di satu kabupaten/kota. Perbedaan substansial antara satu kabupaten/kota dengan lain adalah jumlah perusahaan anggota APINDO yang terdaftar di suatu wilayah, perbedaan ukuran mereka, dan perbedaan tingkat kerusakan yang melanda perusahaan-perusahaan tersebut.



KESIMPULAN

Sangat jelas bahwa sejumlah informasi yang dikumpulkan tidaklah 100 persen bisa diandalkan. Karena itu, beberapa temuan yang dilaporkan dalam studi ini harus dilihat sebagai perkiraan awal, mungkin tidak terlalu jauh dari kenyataan tapi masih ada ruang untuk analisis yang lebih akurat.

Dampak bencana gempa bumi dan gelombang tsunami terhadap perusahaan-perusahaan di Aceh sungguh hebat dan dalam beberapa kasus, sangat sulit memulai kembali aktivitas usaha. Rata-rata 40 persen pekerja dan 60 persen peralatan (termasuk kantor dan bengkel) hilang atau musnah.

Dampak bencana tersebut sangat bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengambil pendekatan geografis untuk mengetahui kebutuhan perusahaan. Jika, dengan dukungan yang bersifat segera, wilayah TIMUR lebih cepat kembali pada tingkat produktivitas seperti sebelum krisis, sebaliknya daerah-daerah yang lain membutuhkan strategi yang sistematis dan melihat kasus per kasus untuk memulihkan dunia usaha di sana. Dampak bencana ini terhadap produktivitas di Aceh rata-rata mencapai 68 persen.

Pembangunan kembali perusahaan-perusahaan di wilayah yang sangat menderita dampak bencana ini tidak bisa dimulai sebelum Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana induk (master plan) pembangunan kembali Aceh. Perusahaan-perusahaan anggota APINDO membutuhkan modal yang sangat besar untuk memulai kembali usahanya, rata-rata Rp 210 juta per perusahaan. Sejumlah perusahaan siap terlibat dalam kegiatan rehabilitasi tapi dalam banyak kasus pekerjaan ini hanya berupa rekonstruksi kecil dan dalam banyak kejadian yang lain hanya menjalankan kegiatan pembersihan.

Mendukung para pengusaha untuk memulai kembali bisnisnya akan menjadi langkah strategis untuk memulihkan kembali lapangan pekerjaan dalam jumlah sangat besar di seluruh wilayah yang terkena bencana tsunami dan gempa bumi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

LAMPIRAN 1 : Lembar Kuesioner

APINDO ENTERPRISES RAPID NEEDS ASSESSMENT			
NAME OF COMPANY			
HEAD OF COMPANY			
BUSINESS SECTOR			
		PRE-TSUNAMI	POST-TSUNAMI
NUMBER OF STAFF	professional		
	part-time		
SKILLS	specialised		
	skilled		
	unskilled		
Average age of labourers			
(%)			
Productivity (quantity)			
Annual budget			
Annual expenditure			
INFRASTRUCTURE	workshop		
	office		
HARDWARE	office furniture		
	computer		
	car		
	lorry		
	bus		